

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Faried. 2012. *Studi Analisa Kebijakan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Bratakusumah, Dedy Supriyadi dan Dadang Solihin. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama
- Brotodiharjo, R.Santoso. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama
- Dun, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gajah
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta PT. Elex Media Komputindo
- Nugroho,Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Samudra, Azhari A. (1995). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung:Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Winarno, Budi. ( 2013 ). *Kebijakan Publik Teori, dan Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lainnya

### **Jurnal**

Bird, Richard M. (1999). *Subnational Revenues : Realities and Prospect*, 7-8.  
[http: info. Worldbank.org](http://info.Worldbank.org)

Jazuli, Ahmad. 2018. Eksistensi TKA di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum danHam RI* 12(1):5

Nababan, Budi.S.P . 2014. Perlunya perda tentang retribusi perpanjangan IMTA di tengah liberalisasi tenaga kerja masyarakat ekonomi asean 2015. *Jurnal Rechthvinding* 3(2) :1

Paulus, Rudolf Yuniarto, Kajian Wilayah “ *JurnalMasalah Globalisasi diIndonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan dan Tantangan*” Vol. 5, No.1, 2014. Hal.67-95

### **Skripsi**

Putri, Ni Made Widnyani, dkk. 2014. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi IMTA di Provinsi Bali. Skripsi Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana Surabaya.

Swastikarini, Cresti. (2012). Pengenaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi. Skripsi FISIP UI

Widyaningrum, Rizkita Puteri. 2014. Implementasi Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi. Universitas Indonesia

Zahra. (2006). Pengenaan Retribusi Izin Pada Usaha Kepariwisataaan di Kota Bogor. Skripsi FISIP Universitas Indonesia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kemenakertrans RI.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA

Peraturan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Tata Cara Penggunaan TKA

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan TKA

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian